



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAYANGKARI SAHIP
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3. NHK : 515674

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 136 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 53.000.000

1. MOBIL, SUZUKI FUTURA ST 150 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FK 110 SCD K6 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.600.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 135.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.469.600.000

III. HUTANG Rp. 380.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.089.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.